

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER DALAM PENGENDALIAN MONITORING DAN PENERTIBAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)**

Dhio Aldhava Mujiono¹, Lutfian Ubaidillah²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

dhioaldhava0107@gmail.com, lutfian.ubaidillah17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pengendalian, monitoring, dan penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya angka peredaran minuman beralkohol yang masih terjadi di Kabupaten Jember, meskipun telah diberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang tegas, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sanksi administratif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan peredaran minuman beralkohol untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Minuman Beralkohol, Pengendalian, Monitoring, Penertiban, Peraturan Daerah, Kabupaten Jember.

ABSTRACT

This research explores the implementation of the local government's authority in Jember Regency in controlling, monitoring, and regulating the distribution of alcoholic beverages based on Regional Regulation No. 3 of 2018. The background for this study lies in the persistent circulation of alcoholic beverages in Jember despite the existence of binding regulations. This empirical juridical research employs a statutory and conceptual approach by analyzing legal norms and real-world implementation. Data collection was conducted

through interviews with the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Department of Industry and Trade of Jember, along with literature review. The findings show that although the regulation provides a robust legal framework, enforcement challenges remain due to limited public compliance, lack of licensing among retailers, and insufficient administrative sanctions. The study recommends strengthening enforcement mechanisms and enhancing public awareness to ensure better regulatory compliance and reduce the negative social impacts of alcohol consumption.

Keywords: *Authority, Local Government, Alcoholic Beverages, Control, Monitoring, Regulation, Regional Regulation, Jember Regency.*

